

POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WA KIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Rivan

NPP. 29.1619

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: rivanr702@gmail.com

ABSTRACT

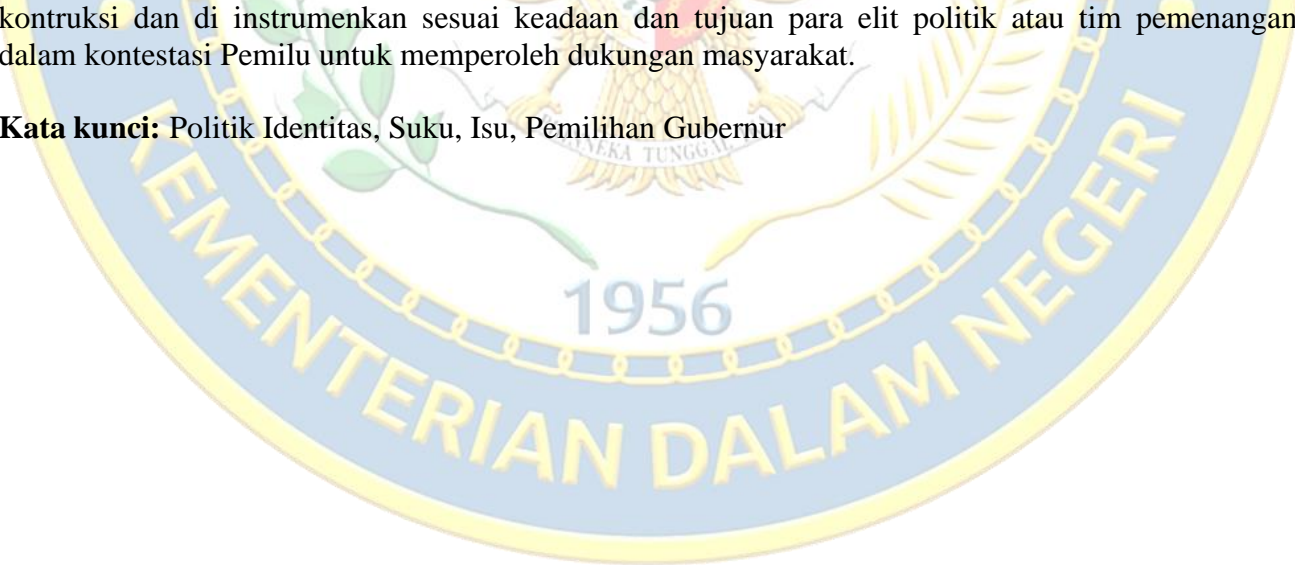
Problem Statement/Background (GAP): The political movement in Southeast Sulawesi Province has long used the archipelagic land system. This political practice provides an opportunity for candidates to carry their interests through a common identity. The practice of mainland islands in local political movements in the election of governor and deputy governor of Southeast Sulawesi in 2018 made the issue of ethnicity a carrier for the representation of candidates to attract the masses at the momentum of the 2018 Southeast Sulawesi Governor Election Since the reign of (late) La Ode Kaimuddin when he led as the 7th governor of Southeast Sulawesi in 1992, during that period he who incidentally is ethnic from the archipelago (Muna) has been looking for a political colleague who has the status of a Kendari city community who is of the Tolaki ethnicity. The existence of this island land application has led local elites to encourage identity politics. **Purpose:** This study aims to determine identity politics and what factors cause identity politics to be brought together with ethnic issues. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative. In this study using the theory of identity politics from Pierre Van Den Bergh where there are two dimensions. The dimensions in question are constructionist and instrumentalist. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results showed that during the Southeast Sulawesi gubernatorial election, there was an issue of ethnicity that was under and still carried out by parties that paired candidates from mainland and islands, this was done in order to attract the public to choose candidate pairs based on their ethnicity. The factors that cause identity politics to emerge are the power factor, the desire of the bearer to give birth to a candidate from the native son of the region, the instrument factor used in the form of social media to raise the issue of identity politics, but the tribal instrument is not so highlighted to avoid conflicts between communities. **Conclusion:** The identity of mainland and islands is often used for political purposes. In this case, ethnic identity is often constructed and instrumented according to the circumstances and goals of the political elite or winning team in election contestations to gain public support.

Keywords: Identity Politics, Ethnicity, Issues, Governor Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam pergerakan politik di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama memakai sistem daratan kepulauan. Praktik politik ini memberikan peluang kepada kandidat untuk membawa kepentingannya melalui kesamaan identitasnya. Praktik daratan kepulauan dalam pergerakan politik lokal pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara di tahun 2018 menjadikan isu suku sebagai pembawa terhadap representasi bagi calon kandidat untuk menarik massa pada momentum Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018. Semenjak era pemerintahan dari (alm) La Ode Kaimuddin pada saat memimpin sebagai gubernur ke-7 di Sulawesi Tenggara pada tahun 1992, pada periodenya ia yang notabene adalah etnis dari kepulauan (Muna) telah mencari kolega politiknya yang berstatus sebagai masyarakat kota Kendari yang merupakan Etnik Tolaki. Masih adanya penerapan daratan kepulauan ini membawa para elit lokal mendorong terjadinya politik identitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik identitas serta faktor apa saja yang menyebabkan politik identitas dibawa bersama isu suku. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan menggunakan teori politik identitas dari Pierre Van Den Bergh dimana terdapat dua dimensi. Dimensi yang dimaksud tersebut adalah konstruksionis dan instrumentalis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara adanya isu suku yang di bawah dan masih dilakukan oleh partai yang memasang calon dari daratan dan kepulauan, hal ini dilakukan agar menarik masyarakat untuk memilih pasangan calon berdasarkan sukunya. Faktor yang menyebabkan politik identitas muncul yaitu faktor kekuasaan, keinginan dari pengusung untuk melahirkan sosok calon dari putra asli daerah, faktor Instrumen yang digunakan berupa media sosial untuk memunculkan isu politik identitas, tetapi instrument suku tidak begitu di tonjolkan untuk menghindari konflik antar masyarakat. **Kesimpulan:** Identitas daratan dan kepulauan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dalam hal ini identitas etnis seringkali di konstruksi dan di instrumen sesuai keadaan dan tujuan para elit politik atau tim pemenang dalam kontestasi Pemilu untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Kata kunci: Politik Identitas, Suku, Isu, Pemilihan Gubernur



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam semua kasus, politik identitas umumnya menampilkan kepentingan ego. Jika kepentingan tersebut dikelola dengan baik maka munculnya politik identitas mungkin dapat menjadi kekuatan serta penstabil dalam masyarakat majemuk, serta menciptakan kesadaran yang sangat dibutuhkan dan kondisi obyektif yang diperlukan untuk integrasi nasional (Bernstein, 2002:537). Melihat kasus politik identitas di belahan dunia barat yang cenderung terlihat kepada unsur agama. Salah satu contoh di kalangan muslim, yang sebenarnya cemas terhadap bagaimana mereka menjelaskan identitas kolektifnya di tempat mereka yang baru. Kaum muslim yang berada di Eropa bisa jadi sudah merasa dipinggirkan dengan hambatan politik sedangkan di Eropa sendiri mereka sangat jarang melakukan adaptasi dan penyesuaian diri, tetapi tidak untuk orang-orang yang memiliki pandangan luas (Bernstein, 2002:538). Setelah melihat masalah politik identitas di belahan dunia bagian Eropa kini masuk ke Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara dengan bangsa yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Firmansyah (2010:1) menemukan bahwa “semenjak awal reformasi, timbul benih perpecahan etnis di daerah dengan dasar konflik kepentingan”. Adakalanya kelompok etnis tersebut masing-masing memperlihatkan rivalitas untuk mengedepankan kepentingan kelompoknya dari segi ekonomi, budaya maupun politik. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa desentralisasi yang lahir dari otonomi daerah sebagai pintu masuk dari kebijakan demokrasi yang menghidupkan politik identitas. Perkembangan sistem demokrasi yang meningkat secara terus-menerus, dicanangkan oleh pihak yang berada dalam pemerintahan itu sendiri. Sistem demokrasi yang berjalan menimbulkan dinamika terkait dengan keberagaman etnis. Fenomena yang muncul pada etnis pun ada beberapa yang menjadi masalah yang krusial seperti timbulnya kekerasan pada massa serta mobilisasi massa yang membludak. Praktik politik identitas merupakan bagian dari fakta sosial yang timbul dan tumbuh lebih luas di berbagai daerah yang dapat dibangun dalam sebuah rezim kekuasaan. Politik identitas bisa dijadikan alat ketika ada pemekaran daerah atau terjadinya pergantian kekuasaan pemerintah.

Ada beberapa unsur yang sering menjadi bahan kajian mengenai politik identitas seperti gender, agama, suku atau etnis, serta ras. Namun penulis hanya mengambil kajian pada etnis. Kemudian penulis membagi politik identitas ke dalam dua tempat operasional berdasarkan pendapat dari Zahrotunnimah (2018:103-104) yaitu:

Pertama, operasional politik identitas yang dimainkan dalam roda pemerintahan secara optimal yang melalui terjadinya pergeseran dari pola sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah daerah leluasa dalam mengatur rumah tangga daerahnya.

Kedua, wilayah operasional bagi politik identitas yaitu melalui etnis atau suku. Beragamnya etnis yang berada di suatu daerah dapat memicu munculnya politik identitas yang membawa etnis sebagai media untuk membawa kepentingannya.

Etnis merupakan pihak yang memiliki peranan besar yang berbasis massa dengan elit lokal yang dapat menggerakkan serta memobilisasi pengikut atau publik sehingga memberikan suaranya untuk putra daerah yang ikut mencalonkan (Al-Farisi, 2018:84). Isu mengenai asal etnis (geopolitik) dari kandidat seakan sudah sering dan tidak akan pernah lepas dari strategi pertarungan antar kandidat. Menurut Zonasultra jika dipetakan wilayah Sulawesi Tenggara maka bisa diperoleh etnik yang terbagi dalam dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Dimana etnik yang mendominasi di daratan adalah Tolaki dan Bugis, dan di kepulauan adalah Etnik Muna dan Buton. Dalam pergerakan politik di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama memakai sistem daratan kepulauan di mana para pasangan calon berasal dari daratan dan kepulauan. Jumlah daftar pemilih tetap pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yaitu 1.628.320, dari data ini ada beberapa yang memilih untuk golput sebanyak 493.141 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU

Sulawesi Tenggara yang dimuat dalam laman sultra.kpu.go.id diperoleh suara sebagai berikut.

Tabel 1.1
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Pemilihan Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 oleh KPU

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Ali Mazi – Lukman	495.880	43,68%
2	Asrun – Hugua	280.762	24,73%
3	Rusda – Syafei	358.537	31,58%

Sumber: Website KPU, [2018](#)

Para pasangan calon tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing etnik yang berada di Sulawesi Tenggara. Pasangan calon Ali Mazi – Lukman Abunawas yang merupakan perwakilan dari etnik Buton dan Tolaki, kemudian pasangan calon Asrun – Hugua yang merupakan perwakilan dari etnik Tolaki dan Buton, dan pasangan calon Rusda Mahmud - Syafei Kahar yang merupakan perwakilan dari etnis Bugis dan Muna.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pergerakan politik di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama memakai sistem daratan kepulauan. Praktik politik ini memberikan peluang kepada kandidat untuk membawa kepentingannya melalui kesamaan identitasnya. Praktik daratan kepulauan dalam pergerakan politik lokal pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara di tahun 2018 menjadikan isu suku sebagai pembawa terhadap representasi bagi calon kandidat untuk menarik massa pada momentum Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018. Semenjak era pemerintahan dari (alm) La Ode Kaimuddin pada saat memimpin sebagai gubernur ke-7 di Sulawesi Tenggara pada tahun 1992, pada periodenya ia yang notabene adalah etnis dari kepulauan (Muna) telah mencari kolega politiknya yang berstatus sebagai masyarakat kota Kendari yang merupakan Etnik Tolaki. Masih adanya penerapan daratan kepulauan ini membawa para elit lokal mendorong terjadinya politik identitas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah membahas mengenai permasalahan ini, yaitu penelitian oleh Irfan Zarfandy (2016) dengan judul “Pengaruh politik identitas terhadap pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013”, penelitian oleh Ahmad Riki (2011) dengan judul “Etnis Betawi dalam politik (studi tentang peran FORKABI dalam pilkada DKI Jakarta 2007)” penelitian oleh Andi Muh Iqbal (2018) dengan judul “Politik identitas etnis mandar dalam pemerintahan bupati Andi Ibrahim Masdar di kabupaten Polewali Mandar”, kemudian penelitian oleh Fitri Hafsari Zainuddin (2017) dengan judul “Pilkada dan politik identitas multikulturalisme di Luwu Timur (studi terhadap kemenangan Thoriq Husler dalam pilkada serentak 2015) dan penelitian oleh Fikri Adrian (2013) dengan judul “Identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah (studi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012)” menjadi rujukan dalam penelitian ini karena sama-sama membahas politik identitas pada pemilihan kepala daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa politik identitas ini akan sering terjadi atau muncul pada pemilihan kepala daerah di Indonesia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dari 5 referensi tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan lokus penelitian serta fokus masalah pada penelitian ini yaitu peneliti akan meneliti lebih dalam seberapa besar politik identitas yang dibawa melalui isu etnis, dengan merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana politik identitas pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dan faktor yang mempengaruhi politik identitas muncul bersama isu etnis pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik identitas serta faktor apa saja yang menyebabkan politik identitas dibawa bersama isu suku.

II. METODE

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan sebuah pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk mempermudah selama proses pelaksanaan penelitian agar tujuan dalam melaksanakan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan menggunakan teori politik identitas dari Pierre Van Den Bergh dimana terdapat dua dimensi. Dimensi yang dimaksud tersebut adalah konstruksionis dan instrumentalis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan setiap indikator untuk menjawab rumusan masalah.

3.1. Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis memperoleh bahwa politik identitas yang berangkat dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Politik identitas di Sulawesi Tenggara dapat dilihat berdasarkan dimensi politik, setiap dimensi tersebut dijabarkan ke dalam indikator sebagai berikut:

A. Konstruksionis politik identitas

1. Pilkada Sebagai Panggung Pertarungan Etnik

Panggung politik yang biasanya memberikan pertunjukan dan kadang sering dikaitkan dengan panggung sandiwara yang dapat melahirkan atau memunculkan manipulasi identitas seperti identitas suku. Kegiatan komunikasi politik sebagai upaya untuk menunjukkan identitas dari pasangan calon. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka etnis justru tampak terus mengalami penguatan mendapat ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnis sering dijadikan dasar legitimasi sejarah sosial politik struktur politik pada level lokal atau daerah. Dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bisa dilihat bahwa bukan hanya soal pemilih yang beragam, tetapi kandidatpun mempunyai latar belakang etnis yang beragam, para pasangan calon merupakan perwakilan dari masing-masing etnik yang berada di Sulawesi Tenggara. Pasangan calon Ali Mazi – Lukman Abunawas yang merupakan perwakilan dari etnik Buton dan Tolaki, kemudian pasangan calon Asrun – Hugua yang merupakan perwakilan dari etnik Tolaki dan Buton, dan pasangan calon Rusda Mahmud - Syaifei Kahar yang merupakan perwakilan dari etnis Bugis dan Muna.

Gambar 1

Berita Terkait Politik Identitas Daratan Kepulauan



Sumber: Website Zona Zultra, 2018

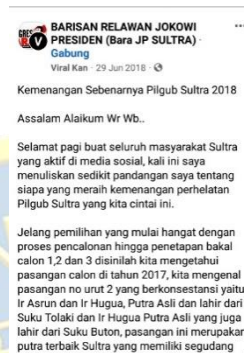
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa politik identitas di Sulawesi Tenggara sudah sering terjadi dengan nama daratan kepulauan. Dalam berita tersebut menerangkan bahwa Politik identitas di Sulawesi Tenggara, "Daratan-Kepulauan", secara sadar atau tidak, menerapkan perkawinan politik antara daratan & kepulauan yang sarat akan konflik itu sendiri, sebagaimana pembahasan diawal.

2. Upaya membangun/dibangunnya politik identitas etnik

Upaya dibangunnya politik identitas dalam Pilkada dimana pendekatan situasional cenderung digunakan dalam Pilkada untuk dapat mengetahui situasi-situasi di lingkungan masyarakat dan dapat menarik perhatian masyarakat kepada calon untuk memberikan hak suaranya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pola strategi yang digunakan oleh pasangan calon, dimana calon dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Munculnya identitas-identitas yang dikonstruksi sebagai pembeda untuk menentukan mana bagian dari "diri" atau "orang lain" dalam hubungannya dengan kepentingan politik, etnik adalah bukti nyata hadirnya politik identitas. Etnis mayoritas dalam konteks politik lokal menurut pandangan geopolitik sangat memiliki pengaruh besar dalam memperoleh suara masyarakat. Dengan identitas itu, seseorang dapat saja diberi hak-hak politik untuk menunjukkan eksistensi kepada masyarakat.

Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, visi dan misi dari pasangan calon menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya, disamping hal tersebut kedekatan dengan masyarakat yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan situasional untuk meraih posisi kekuasaan. Dinamika politik identitas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pilkada tahun 2018 dengan masyarakat multikultural menjadikan pasangan calon dan elit politik maupun tim pemenangan yang ada dibelakangnya harus memiliki strategi atau upaya membangun identitas-identitas masyarakat, bukan hanya masyarakat mayoritas tetapi juga masyarakat minoritas yang mendiami wilayah tersebut. Bahwa memang masih ada saja isu yang muncul atau dibangun pada saat pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara dan tidak bisa dipungkiri adanya upaya membangun identitas etnis yang dilakukan oleh partai maupun tim pemenangan pasangan calon untuk memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui profil maupun latar belakang dari calon tersebut. Situasi ini mendorong setiap politisi berupaya membangun pendekatan mengenai identitas yang dominan di masyarakat untuk mencapai tujuannya, dan dari tim sukses juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan *reward* dari calon yang terpilih.

Gambar 2 Pernyataan Dalam Bentuk Status Oleh Bara JP



Sumber: Facebook Bara JP SULTRA, 2018

Dari gambar *screenshot* status *facebook* yang dibuat oleh Bara JP SULTRA merupakan bentuk upaya dibangunnya identitas yang dimiliki oleh pasangan calon yang dapat menarik perhatian masyarakat apalagi di status tersebut membawa suku dan menerangkan bahwa pasangan calon merupakan putra asli daerah terbaik, hal ini sebagai bentuk untuk menarik perhatian masyarakat sehingga kemungkinan besar masyarakat dapat tertarik dengan isu seperti ini untuk menyerahkan hak pilihnya kepada paslon tersebut.

B. Instrumentalisme Politik Identita

1. Suku Menjadi Alat Pemenang Pilkada Melalui Kampanye

Terkait dengan posisi etnis dalam Pilkada suatu wilayah yang mempunyai keberagaman etnik, biasanya akan menonjol dalam Pilkada karena ketika dalam proses memilih seorang pemimpin masyarakat akan melihat latar belakang yang dimiliki aktor tersebut baik dari etnik, dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan bahwa faktor etnis sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses Pilkada. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa faktor etnis tidak terlalu mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses Pilkada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara masih adanya instrumen identitas sebagai alat kemenangan, namun hal tersebut tidak begitu diperlihatkan atau di tonjolkan sebagai alat kemenangan pasangan calon, dan berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan masyarakat memang memilih kadang berdasarkan politik uang, suku, orang yang dikenal. Walaupun dalam hal ini instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjolkan untuk menghindari konflik antar masyarakat tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya inisiatif penggunaan identitas etnis yang menonjol pada identitas pasangan calon yang dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sebenarnya semua merupakan pasangan calon dari masing-masing suku tetapi kadang bagaimana para tim sukses untuk menarik perhatian atau memobilisasi masyarakat agar memilih paslon, namun tidak semua dapat terpengaruh begitu saja. Dan yang perlu di tekankan bahwa tidak mengapa jika menggunakan identitas yang ada pada diri pasangan calon selama itu masih dalam batas normal atau tidak melampaui batas tanpa menyebabkan adanya isu-isu yang dapat menjatuhkan calon pasangan yang lain. Kemudian selain suku yang digunakan sebagai alat untuk memenangkan pilkada melalui kampanye yaitu dari media seperti pada gambar 3 yaitu postingan di media yang mengajak untuk memilih pasangan calon dengan membawa isu putra asli daerah.

2. Suku Dimanfaatkan Untuk Memobilisasi Dukungan Untuk Pemenang

Politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik. Politik identitas dijadikan sekedar alat manipulasi bagi penguasa untuk menggalang suara guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Latar belakang dari seorang politisi dapat mempengaruhi

elektabilitas atau popularitas di antara masyarakat. Karakteristik juga menjadi bagian dari cerminan dari seorang politisi. Pilkada tingkat lokal memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak para elit politik memanfaatkan etnis dalam memobilisasi kemenangan calon yang diusung. Dimana masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan replika dari Indonesia yang terdapat berbagai macam etnis baik mayoritas maupun minoritas sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dengan orang lain, maka saat itu juga identitas etnis memformulasikan keberadaan atau sesuatu diluar persamaan-persamaan tersebut. Dalam Pilkada pendekatan instrumentalisme yang digunakan sebagai salah satu instrumen kekuatan dalam memobilisasi dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam konteks Pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Tolaki dan Buton. Maka tidak bisa dipungkiri terdapat kalangan elit yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga etnis dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui masyarakat yang masih tradisional dan memegang teguh karakteristik yang dimilikinya. Wawancara dengan salah seorang informan, selaku pengamat politik, beliau mengatakan bahwa, “Mengenai politik identitas pada pemilu di tahun 2018 memang agak kencang karena isu yang selalu dibuang atau di bawah mengenai daratan dan kepulauan hal ini menunjukkan masih ada sekat-sekat antara masyarakat yang ingin mendorong calon dari sukunya, contohnya paslon nomor urut dua yaitu bapak Asrun yang merupakan suku tolaki, padahal jika dilihat bahwa peluang kemenangannya sangat tinggi tetapi karna tersandung kasus jadi tidak memungkinkan. Tapi di daerahnya yaitu konawe selatan yang merupakan daerah basis terbesar suku tolaki masih menang. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada masalah mereka masih tetap memilihnya”. Pernyataan ini didukung dengan data bahwa di daerah konawe selatan calon dari nomor urut 2 yaitu bapak Asrun mendapatkan suara sebanyak 51.321 atau 40,65%, sedangkan calon nomor urut 1 dengan suara 40.689 atau 32,23%, dan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara 34.246 atau 27,12%.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tim pemenangan pasangan masih memanfaatkan identitas yang dimiliki oleh pasangan calon sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat (pemilih) dengan pendekatan instrumentalisme sesuai dengan situasi masyarakat. Sehingga politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses pilkada yang dilakukan secara intens dalam bentuk intraksi simbolik untuk memobilisasi dukungan masa. Tetapi dari hasil yang didapatkan dari beberapa informan bahwa masih ada juga *money* politik yang timbul walupun hanya berupa barang ini juga menjadi temuan yang didapat oleh penulis bahwa bukan hanya identitas suku yang di bawah melainkan ada permainan *money* politik dalam memobilisasi pendukung.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Politik Identitas

Dalam perjalanan politik di Sulawesi Tenggara tidak lepas dari adanya politik identitas yang muncul. Politik identitas ini muncul tentu ada yang mempengaruhinya sehingga bisa muncul saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan walikota. Berdasarkan teori politik identitas dari Pierre Van Den Bergh bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya politik identitas muncul bersama isu etnis yaitu dari konstruksionisme maupun instrumentalisme, dari keduanya sangat terhubung dimana pada dimensi instrumen pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 tim pemenangan pasangan masih memanfaatkan identitas yang dimiliki oleh pasangan calon sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat (pemilih) dengan pendekatan instrumentalisme sesuai dengan situasi masyarakat. Kemudian instrumen yang digunakan juga berupa media sosial untuk mengkonstruksikan atau membangun isu politik etnis pada pemilihan Gubernur seperti yang tercantum dalam gambar 3, Sehingga politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses pilkada yang dilakukan secara intens dalam bentuk intraksi simbolik untuk memobilisasi dukungan masa, tetapi instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjalkan untuk menghindari konflik antar masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa masih adanya isu yang di bawah terkait politik identitas dan masih adanya pemasangan yang dilakukan oleh partai yang memasang dari perwakilan daratan dan kepulauan, hal ini dilakukan agar menarik atau memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon yang berasal dari daerahnya atau putra asli daerah. Identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok baik di peroleh dari konstruktivisme dan instrumentalisme identitas yang di miliki atau yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dimana identitas daratan dan kepulauan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dalam hal ini identitas etnis seringkali di kontruksi dan di instrumenkan sesuai keadaan dan tujuan para elit politik atau tim pemenangan dalam kontestasi Pemilu untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi munculnya politik identitas ini yaitu dari faktor kekuasaan kemudian adanya keinginan dari pengusung untuk melahirkan sosok calon yang membawahi nama daerah dan pasangan calon yang merupakan perwakilan dari daratan dan kepulauan. Kemudian Instrumen yang digunakan yakni berupa media sosial untuk memunculkan isu politik identitas, tetapi instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjolkan untuk menghindari konflik antar masyarakat tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya inisiatif penggunaan identitas etnis yang menonjol pada identitas pasangan calon yang dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian: Saran saya kepada penyelenggara pemilu serta penanggung jawab terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap pemilu untuk bertindak tegas bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran, kemudian untuk pasangan calon maupun partai pengusung untuk mengelolah isu yang beredar dengan bijak sehingga tidak terjadi perpecahan dan untuk masyarakat lebih rasional dalam memilih pasangan calon.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan khususnya Ketua KPU dan Sekretaris KPU, para pengamat politik, serta masyarakat yang telah meluangkan waktu yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, L. S. (2018). *"Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila"*, Jurnal Aspirasi Vol. 2, 77–90.
- Bernstein, M. (2002). *"Identities and Politics"*, *Social Science History* Vol. 26(3), 531–581.
- Firmansyah, D. (2010). *Peran Politik Etnis Dalam Pilkada; Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Zahrotunnimah, Z. (2018). *"Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia"*, 'Adalah Vol. 2(11), 103–104.
- <https://sultra.kpu.go.id/>. *_Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 oleh KPU*. Jumat, 24 September 2021
- Facebook Bara JP SULTRA, 2018
- Website zona sultra, 22 maret 2020

